

# KAJIAN EPIGRAFIS PRASASTI BABAHAN

## *Epigraphy Study of Babahan Inscriptions*

**Hedwi Prihatmoko**

Balai Arkeologi Bali

Jl. Raya Sesetan No. 80, Denpasar 80223

Email: hedwi.prihatmoko@kemdikbud.go.id

Naskah diterima: 01-02-2017 ; direvisi: 20-03-2017 ; disetujui: 11-04-2017

### **Abstract**

*Babahan inscriptions are not fully published until now. Historical data which were revealed from Babahan inscriptions are very limited. This research aims to reconstruct cultural history and reveal social institutions depicted in Babahan inscriptions in order to add historical data of ancient Bali. The data were collected through observation, such as physical attributes, material, amount of plates, amount of lines on every plate, type of letters, and type of languages, then continued with literature study. Analysis was done through transliteration, editing, and translation. Interpretation is presented descriptively by placing it in the context of ancient Bali history. The result of this research is that Babahan inscriptions could be grouped into two groups. Group one uses ancient Balinese letter and language which was issued by King Ugrasena. Group two uses ancient Javanese letter and language which was issued by King Wālaprabhu. The social institutions, depicted by Babahan inscriptions, are political and religious institutions. Political institution is depicted through the mentions of official positions in the government and social order in society. Religious institution is depicted through the mentions of official positions of religious leaders, sacred places, the idea of king leadership, and śapatha.*

*Keywords: epigraphy, babahan inscriptions, ugrasena, wālaprabhu, social institution.*

### **Abstrak**

*Prasasti Babahan merupakan kelompok prasasti yang belum diterbitkan secara utuh. Data sejarah yang diungkapkan dari Prasasti Babahan masih sangat terbatas hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi sejarah kebudayaan dan mengungkapkan gambaran pranata sosial yang ada di dalamnya untuk melengkapi penyusunan sejarah Bali kuno. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap unsur fisik, bahan, jumlah lempeng, jumlah baris tiap lempeng, jenis aksara, dan jenis bahasa, serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan melalui alih aksara, penyuntingan prasasti, dan alih bahasa. Penafsiran disajikan secara deskriptif dengan menempatkannya di dalam konteks sejarah Bali kuno. Hasil penelitian ini adalah Prasasti Babahan merupakan prasasti sima yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok I menggunakan aksara dan bahasa Bali kuno yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena, sedangkan kelompok II menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Raja Wālaprabhu. Pranata sosial yang tampak dari Prasasti Babahan adalah pranata politik dan agama. Pranata politik digambarkan melalui penyebutan nama jabatan di pemerintahan dan tatanan sosial di masyarakat. Pranata agama digambarkan melalui penyebutan nama jabatan pemuka agama, tempat suci keagamaan, gagasan kepemimpinan raja, dan śapatha.*

*Kata kunci: epigrafi, prasasti babahan, ugrasena, wālaprabhu, pranata sosial.*

## **PENDAHULUAN**

Sebaran prasasti di Indonesia cukup banyak, di antaranya terdapat di Kalimantan,

Jawa, Sumatra, dan Bali, bahkan hingga Nusa Tenggara Barat. Prasasti tertua ditemukan di Kalimantan Timur berupa tiang batu yang

disebut *yūpa*, yang berasal dari abad ke-5 Masehi dan dituliskan dalam Bahasa Sanskerta. Meskipun sumber tertulis tertua ditemukan di Kalimantan, jumlah tinggalan prasasti terbanyak hingga saat ini berada di Pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 386 kelompok prasasti (Nastiti 2009, 381-387). Urutan berikutnya dalam hal jumlah tinggalan prasasti adalah Bali dengan jumlah mencapai 251 kelompok prasasti (Suarbhawa et al. 2013, 2).

Prasasti terbentuk dari kata depan *pra* yang berarti di hadapan, di depan, atau ke depan dan akar kata kerja *sams* yang berarti memuji. Kata *praśasta* merupakan bentuk *past passive participle* atau adjektif verbal dari kata *praśams* yang berarti terpuji atau termasyhur. Adapun secara harfiah, kata *praśasti* dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang mengandung kata-kata pujian (Monier-Williams dalam Astra 2009, 113). Prasasti adalah sumber-sumber sejarah dari masa lampau yang biasanya ditulis di atas batu dan logam. Prasasti pada umumnya merupakan putusan resmi yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan, dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu, dan biasanya dikaruniakan dengan upacara-upacara. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber tertulis, prasasti memiliki tingkat keabsahan paling tinggi di antara tinggalan-tinggalan tertulis masa lalu (Boechari [1977] 2012, 4; Djafar 1991, 177; Bakker 1972, 9-10). Sifat yang resmi dan tingkat keabsahan yang tinggi tersebut menyebabkan prasasti menjadi salah satu sumber utama penyusunan sejarah kuno Indonesia. Prasasti merupakan objek utama dalam penelitian epigrafi. Secara luas, epigrafi mempelajari dan menafsirkan sumber tertulis yang meliputi prasasti, karya sastra, benda-benda yang mengandung tulisan yang dipahatkan melalui berbagai jenis media (misalnya mata uang, senjata, dan alat-alat perlengkapan), termasuk berita asing berupa catatan atau laporan perjalanan asing (Tiongkok, Portugis, dan Arab). Namun secara khusus dalam ilmu arkeologi, epigrafi merupakan kajian terhadap jenis, bentuk, gaya aksara,

dan bahasa yang termasuk ke dalam kategori *archaic*, yaitu yang sudah tidak digunakan lagi sebagai alat komunikasi tertulis atau lisan di kalangan masyarakat sekarang, yang sering terdapat dalam prasasti (Kartakusuma 2003, 200). Prasasti merupakan salah satu data sejarah penting dalam rekonstruksi sejarah kebudayaan Indonesia, terutama untuk masa klasik Hindu-Buddha. Penelitian epigrafi merupakan usaha merekonstruksi kehidupan masa lalu yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sekaligus menjadi bahan bagi penelitian ilmu sosial lainnya yang pada akhirnya bermuara pada penulisan historiografi secara utuh (Dwiyanto 1995, 238).

Prasasti Babahan pernah diteliti oleh Roelof Goris, kemudian diterbitkan dalam buku *Prasasti Bali* pada tahun 1954. Namun, penerbitan hanya dilakukan terhadap satu lempeng saja dengan nomor inventaris 102. Terbitan tersebut berupa alih aksara ke aksara latin dan alih bahasa ke bahasa Belanda, tetapi belum dilakukan pengulasan terhadapnya (Goris 1954, 8, 64, 130-131). Dalam buku yang sama, Goris menyebutkan adanya kelompok lain dari Prasasti Babahan, yaitu kelompok prasasti bernomor inventaris 501, tetapi tidak diketahui jumlah lempeng dan isinya secara detail karena belum diterbitkan. Goris hanya menyebutkan nama raja yang mengeluarkan, yaitu Śrī Mahārāja Śrī Wālaprabhu dan keterangan, bahwa prasasti ini berisi daftar nama pejabat, tanpa ada perincian apapun (Goris 1954, 26). Hingga saat ini, belum ada yang mengulas Prasasti Babahan secara khusus dan penggunaannya dalam penyusunan sejarah Bali kuno masih sangat terbatas. Selama ini, penggunaan data sejarah dari Śrī Mahārāja Śrī Wālaprabhu yang disebutkan dalam Prasasti Babahan nomor 501 hanya mengacu pada deskripsi singkat yang disampaikan oleh Goris. Padahal, prasasti yang dikeluarkan raja ini jumlahnya sedikit, yaitu baru ditemukan sebanyak tiga kelompok prasasti saja (lihat Ardika et al. 2013, 123-124; Astra 1997, 75; Sumadio 1993, 302-303). Selain Prasasti

Babahan, dua kelompok prasasti lain yang diduga dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Wālaprabhu adalah Prasasti Klandis dan Prasasti Ababi. Prasasti Klandis pernah diterbitkan dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG) XXX* pada tahun 1885. Terbitannya hanya berupa alih aksara ke dalam aksara latin saja, tanpa disertai dengan terjemahan (van der Tuuk dan Brandes 1885, 619-624). Sementara itu, Prasasti Ababi diterbitkan dalam buku *Himpunan Prasasti Bali Koleksi R. Goris dan Ktut Ginarsa* pada tahun 1979, tetapi juga hanya berupa alih aksara ke aksara latin, tanpa disertai terjemahan (Suhadi 1979, 8-10). Hal ini memperlihatkan bahwa penerbitan Prasasti Babahan merupakan suatu upaya penting untuk melengkapi informasi sejarah Bali kuno, terutama yang terkait dengan masa pemerintahan Raja Wālaprabhu. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana isi dari Prasasti Babahan dan pranata sosial apa saja yang terungkap.

Secara umum, ilmu arkeologi memiliki tiga tujuan, yaitu merekonstruksi sejarah berdasarkan budaya materi dari manusia masa lalu, merekonstruksi cara hidup dan perilaku manusia atau masyarakat pendukung budaya materi di masa lalu, dan menjelaskan proses perubahan budaya yang terjadi di masa lalu (Renfrew dan Bahn 2000, 13-16). Epigrafi sebagai bagian dari ilmu arkeologi juga berlandaskan tujuan tersebut, yaitu merekonstruksi sejarah kebudayaan, bahkan dimungkinkan hingga rekonstruksi cara hidup dan penjelasan terhadap proses perubahan budaya melalui prasasti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan dan menempatkan informasi yang terungkap dari prasasti Babahan untuk ditempatkan dalam historiografi Bali kuno.

Dalam rangka penyusunan sejarah kuno Indonesia, prasasti dapat memberikan gambaran mengenai struktur kerajaan, birokrasi, kemasyarakatan, perekonomian,

agama, kepercayaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia kuno (Boechari [1977] 2012, 25). Suatu prasasti dapat memberikan gambaran yang lengkap dari suatu pranata sosial masyarakat atau hanya sebagian kecil, tergantung dari kelengkapannya. Terkadang, temuan prasasti bersifat fragmentaris, sehingga informasi yang terkandung tidak banyak. Secara umum, prasasti yang lengkap memiliki unsur-unsur yang terdiri atas bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembukaan biasanya berisi (a) angka tahun dan unsur penanggalannya, (b) nama atau gelar raja yang memerintahkan pengeluaran prasasti, dan (c) nama pejabat yang menerima perintah raja. Bagian isi biasanya berisi (a) *sambandha*, yaitu sebab-sebab dikeluarkannya prasasti, (b) keputusan raja yang biasanya berisi tentang keringanan dan/atau pembebasan pajak, (c) hak dan kewajiban penduduk desa yang menerima anugerah keputusan tersebut, (d) aturan pembagian waris, dan (e) batas-batas desa. Bagian penutup biasanya berisi (a) saksi-saksi yang terdiri atas pejabat tingkat pusat dan daerah, (b) para dewa yang diserukan sebagai saksi turunnya keputusan tersebut, (c) *sapatha*, yaitu kutukan bagi mereka yang berani melanggar ketetapan yang termuat dalam prasasti tersebut (Wiguna et al. 2004, 28; cf. Astra 2009, 114). Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa, biasanya pada bagian pembuka terdapat juga seruan pembukaan berupa seruan selamat atau seruan hormat untuk dewa. Adapun pada bagian isi, terkadang terdapat juga uraian suatu peristiwa pokok sebelum menyebutkan alasan atau sebab dikeluarkannya prasasti. Kemudian, pada bagian penutup terdapat juga uraian tentang upacara yang diselenggarakan pada saat penetapan (Djafar 1991, 176; cf. Boechari [1977] 2012, 6-17).

Berdasarkan jenisnya, prasasti masa klasik Hindu-Buddha dikategorikan ke dalam lima jenis, yaitu (1) prasasti *sima*, yaitu prasasti yang berisi maklumat raja atau bangsawan untuk menjadikan suatu daerah menjadi *sima* atau wilayah perdikan, yaitu wilayah

yang diubah statusnya dalam hal perpajakan karena dibebani tugas baru yang terkait dengan pemeliharaan bangunan keagamaan, pemeliharaan sarana umum, dan kepentingan balas jasa kepada seseorang atau sekelompok orang, (2) prasasti *jayapattra* atau *jayasong*, yaitu prasasti yang berisikan keputusan hukum yang diberikan kepada pihak yang menang di pengadilan, (3) prasasti *jayacihna*, yaitu prasasti yang menyatakan kemenangan seorang raja terhadap musuhnya, (4) prasasti *suddhapattra*, yaitu prasasti yang berisi pelunasan hutang atau proses gadai, dan (5) prasasti yang berisikan mantra-mantra Buddha dan Hindu yang biasanya dituliskan pada tablet tanah liat (Soesanti 1997, 175-176; Astra 2009, 114; cf. Bakker 1972, 13; Boechari [1977] 2012, 6, 24). Pembahasan mengenai prasasti pada akhirnya akan menempatkan prasasti di dalam konteks sejarah Indonesia kuno.

## METODE

Prasasti Babahan yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari tiga lempeng. Prasasti Babahan saat ini berada di Geria Belayu, Desa Belayu, Kecamatan Marga, Tabanan dengan keletakan astronomis 8°31'1.09" Lintang Selatan dan 115°10'11.23" Bujur Timur. Pada awalnya, Prasasti Babahan tidak ditemukan dan disimpan di tempat tersebut, tetapi di

Pura Puseh Jambelangu, Desa Adat Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Menurut masyarakat *penyungsong* Pura Puseh Jambelangu, masih terdapat satu lempeng prasasti yang disimpan di pura tersebut, tetapi masih belum bisa diakses pada saat penelitian ini dilaksanakan (gambar 1).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengungkapkan segala informasi yang terkandung di dalam Prasasti Babahan. Secara umum, kajian terhadap Prasasti Babahan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penafsiran data. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung dan studi kepustakaan. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengidentifikasi prasasti. Unsur-unsur yang diidentifikasi meliputi unsur fisik, bahan, jumlah lempeng, jumlah baris tiap lempeng, jenis aksara, dan jenis bahasa. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian prasasti dan wilayah Babahan. Tahap analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis prasasti yang dimulai dengan melakukan alih aksara dan penyuntingan prasasti. Penyuntingan prasasti dalam penelitian ini menggunakan edisi naskah tunggal. Penentuan teks prasasti sebagai data memiliki proses yang cenderung tidak sulit



**Gambar 1.** Lokasi Prasasti Babahan saat ini di Geria Belayu dan lokasi awal di Pura Puseh Jambelangu. (Sumber: Diolah dari Google Earth)

karena sifat prasasti yang sebagian besar berupa prasasti tunggal dan tidak disalin dalam jumlah banyak. Hal ini sesuai juga dengan sifat data prasasti sebagai salah satu sumber tertulis yang memiliki tingkat keabsahan paling tinggi di antarainggalan tertulis masa lalu lainnya. Penyuntingan berupa penyuntingan edisi naskah tunggal meliputi edisi diplomatik, yaitu penyuntingan naskah tanpa mengadakan perubahan apapun, dan edisi standar, yaitu penyuntingan naskah dengan melakukan pembetulan-pembetulan kesalahan kecil dan ketidakkonsistenan, serta pengejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Soesanti 1997, 173-178). Penyuntingan dalam penelitian ini akan menggunakan edisi diplomatik. Jika terdapat kesalahan penulisan di dalam prasasti, pengoreksian akan ditempatkan langsung di dalam teks prasasti tanpa menghapus atau mengganti penulisan aslinya. Tahap selanjutnya adalah alih bahasa. Alih Bahasa merupakan tahap penerjemahan dari bahasa yang digunakan di dalam prasasti ke dalam bahasa lain, dalam penelitian ini adalah bahasa Indonesia. Penerjemahan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penerjemahan bebas, yaitu penerjemahan yang disesuaikan dengan konteks alih-bahasanya untuk memudahkan pemahaman terhadap isi atau informasi yang disampaikan dalam

prasasti. Penerjemahan dilakukan dengan menggunakan daftar terjemahan kata yang disusun Roelof Goris (1954, 203-339), *Kamus Bali Kuno-Indonesia* yang disusun Ida Wayan Oka Granoka et al. (1985), dan *Old Javanese-English Dictionary* yang disusun P.J. Zoetmulder (1982). Kemudian, tahap penafsiran disajikan secara deskriptif melalui pemaparan semua pranata sosial yang terkandung dalam Prasasti Babahan dan penempatan konteksnya di dalam sejarah Bali kuno.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Umum Prasasti Babahan

Prasasti Babahan terbuat dari tembaga. Pada saat pengambilan data, kondisi prasasti cukup terawat dengan tatahan aksara yang masih terlihat. Prasasti Babahan yang diteliti terdiri dari tiga lempeng. Satu lempeng hanya ditatah pada satu sisi, sedangkan dua lempeng ditatah pada kedua sisinya. Jumlah baris pada tiap sisi lempeng adalah sama, yaitu enam baris. Prasasti Babahan yang menjadi objek penelitian terdiri dari dua kelompok prasasti. Kelompok I terdiri dari satu lempeng yang hanya ditatah pada satu sisi, sedangkan kelompok II terdiri dari dua lempeng sisinya. Prasasti Babahan kelompok I menggunakan aksara dan bahasa Bali Kuno, sedangkan kelompok II menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno (gambar 2).



**Gambar 2.** Prasasti Babahan kelompok I dan kelompok II.  
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

## Alih Aksara Prasasti Babahan

Prasasti Babahan kelompok I hanya terdiri dari satu lempeng saja dan merupakan bagian awal (lempeng 1) karena terdapat seruan pembuka di dalamnya. Dalam penulisan prasasti, penulisan pada lempeng 1 biasanya dimulai dari sisi belakang (bagian b), sedangkan bagian depan (bagian a) dibiarkan kosong. Prasasti Babahan kelompok I pernah dibaca dan diterbitkan oleh Goris (1954, 64, 130-131) dengan nomor inventaris 102 berupa alih aksara dan alih bahasa saja. Dalam terbitannya, terdapat beberapa kesalahan pembacaan yang dilakukan oleh Goris sehingga penelitian ini memerlukan pembacaan ulang prasasti. Prasasti Babahan kelompok II diberi nomor inventaris 501 oleh Goris (1954, 26), tetapi tidak ada alih aksara dan alih bahasanya. Kelompok ini terdiri dari dua lempeng dan memiliki nomor yang ditatah pada sisi kiri prasasti, yaitu nomor 4 dan 5. Sisi lempeng yang tidak bernomor merupakan bagian depan (bagian a), sedangkan yang bernomor merupakan bagian belakang (bagian b).

### Kelompok I Lempeng 1b

(1) //O// śaka 839 bulan śrawaṇa kṛṣṇa, tithi caturthī, rggas pasar wijaya krānta, tatkālan saṅ ratu śrī ugrasena tua lumaku ka buwunan, saha twa ya nugrahenda tua da pitā- (2) maha di buwunan ida bhikṣu dharmmeśwara, meda pitāmaha di soṇan bhikṣu dharmmacchāya, me partapanan dahulun bukit di ptuṅ, saha twa pisukataṅ saṅ ratu śrī ugrasena, tua pari- (3) maṅḍalan (Goris membacanya *parimaṅḍala*) partapanan di ptuṅ, haṅgaña denan air taḷbud, haṅgaña lodan hyaṅ padmaka, haṅgaña daruhan airana (Goris membacanya *air*) daruhan, haṅgaña dañinan da hyaṅ baṅkyaṅ sidi saha twa syuruḥ da- (4) to partapanan di ptuṅ pasamahyan tirthāña (Goris membacanya *tibaña*), jalanañen anak maṅdirus, pañatawanañña tua partapanan di ptuṅ, pañuṅsuñyan di catuspatha, anadatu anak dharmmana, tumaku marhuma, maṅrawi (5) di kasimayan banua len dahulun bukit

*hyaṅ wihara śīma, śāla siluṅluṅ, kakluṅan, pañulumbigyan, pēdam (seharusnya pēdēm), prataya, aluki tkan prāpta kālaña, kimatiña (Goris membacanya dimatiña) tyaraḥ a- (6) nak, kithidaña (Goris membacanya kiṭidaña) labuḥ manekayu, kyaṅ tkilap, kasiddhanda pitāmaha suruhēn marhantwaṅ ya, tani pibēñēnya, tani bratyanya anak wanua tani pahenyān ya pirak pañukṣma*

### Kelompok II Lempeng 4a

(1) *man mapajari, maraddhañin, tinamin tan kawuntat sira mpu hulu skar mañaran bisani añañjali ba lbani pāduka śrī mahārāja, śrī wālaprabhu makasopāna taṅḍa rakryān ri pakirakirān i jro maka-* (2) *behan makādi para senāpati, karuhun mpuñku śewasogata sambandha ni pañañjali sira mpu hulu skar i pāduka śrī mahārāja, ahyañamintānugraha titīsanāmrtā hyun tumambrakna rasani prasā-* (3) *stinya, anugraha nirātīta prabhu, tan subaddha awuk ripta ni pukulun tan wnaṅ winaca, tēkyēn mwaṅ pāduka śrī mahārāja, wiṣṇumurti sākṣāt jagat pālaka kumiñki sakaparipūrṇakna nikāṅ rāt ri* (4) *nakṣa nīra, karuhun saṅ hyaṅ sarwwa dharma, mataṅnyan ḍumawuh anugraha pāduka śrī mahārāja, i sira mpu hulu skar anambrakna rasani prasāstīnya mūlānugraha nirātīta prabhu, atēhēr wnaña ya gawa ya kali* (5) *anamprasāra, anu hana lmahiñalmaḥ salwīranya, anampila bañuniñabañu tan ḍawuhana ḍaṅḍa, dadya rugakna kamiri, bodhi, warinīn, skar kuniṅ, mēñḍē, kamukus, kapulaga, sakweḥni kayu larañan ya-* (6) *n katñahana kalinya añēbi sawahuma, makādi tirsan tan katampuhana doṣa, mañkana yan patahil ḍṛwya haji, tan ḍawuhana pamli, tan palakwana pirak deniṅ cakṣu para cakṣu, tan sipatēn*

### Kelompok II Lempeng 4b

(1) *tan kna paṅlyyē (seharusnya paṅlyē), tan kna patusuk mwaṅ pakirab paptan sakweḥni padṛwya hajyanya parawulu wulu, tkeñupahan atēhēr magēhakēn rasani prasāsti mūla, tamolahi ripta tinambrakēn, mañkana*

rasanya (2) *nugraha pāduka śrī mahārāja, irikāṅ dharmma i ptuṅ, sapasuk dharmma, tlasinaksyakēn i sanmukha taṅḍa rakryān riṅ pakirakirān i jro makabehan makādi para senāpati, karuhun mpuṅku śewasogata, si-* (3) *ra hana kāla samaṅkana, saṅ senāpati ḍiṅḅaṅ pu prakāsa, saṅ senāpati wāranasi pu tatwa, saṅ senāpati wṛsantēn pu mnaṅ, saṅ senāpati maṅiriṅṅin pu yoga priya, saṅ senāpati kuturan pu antuk, sa-* (4) *mgat lulwan hudan watu, samgat maṅumbul capugal, samgat paṅjiṅ ganti cicin, samgat manurataṅḅjṅḅā i hulu wāhya, samgat manurataṅḅjṅḅā i tṅaḅ jeṅ, samgat manurataṅḅjṅḅā i wuntat padartha,* (5) *samgat cakṣu kāraṅa krānta siwal, samgat adhikāraṅa pura haliwat, samgat cakṣu kāraṅa pura naṅuk, samgat pituha clēbaṅ, karuhun mpuṅku śaiwasogata, sirēṅ kaśaiwan mpuṅkwiṅ kanyā* (6) *ḍaṅḅcāryya yati prawāra, mpuṅkwiṅ baṅutiga ḍaṅḅcāryya suddhawaṅsa, mpuṅkwiṅ pasabhān ḍaṅḅcāryya prapaṅcita, mpuṅku makarun ḍaṅḅcāryya rājāgama, samgat juru wadwā ḍaṅḅcāryya oṣadha, sireṅ kaso*

### **Kelompok II Lempeng 5a**

(1) *gatan mpuṅkwiṅ kadhikāran ḍaṅḅpādhyā (seharusnya ḍaṅḅpādhyaya) prawacya, mpuṅkwiṅ nālṅja ḍaṅḅpādhyaya sarwwarṅhasiddha, mpuṅkwiṅ (ba)jrasṅkara ḍaṅḅpādhyaya wiriṅci, mpuṅkwiṅ śūryyawaśa ḍaṅḅpādhyaya buddha putra, samgat maṅireṅireṅ (...)* (2) *wa(ndami raja)śa //°// atēhēr inimbunan i śikṣā, ujar haji, umajara i sakweḅ nikāṅ wwaṅ madalan asuṅsuṅ sahuma liwati saparimaṅḍala nikanāṅ dharmma i ptuṅ, tka riṅ kaniṣṅa madhyamottama, salwīrani kawwaṅḅanya, kawatēkanya i* (3) *tan hana ni wehēn baryya baryya śīla molahulāḅ tan raparapān sakweḅniṅ tuwutuwuhan kadyaṅḅāniṅ sarwwa phala mūla phala, tkeṅ wnaṅwnaṅḅā yā mitik, tan panēhērakna ḍṛwya sapaniskāra niṅ rapā mahumaḅ* (4) *tan panata sahatēp niṅ bagaṅjiṅ mwaṅ pahōman, yapwan hana kama tan amurug śikṣā senuhutakēn pāduka śrī mahārāja, tumulwi*

*śikpēnya (seharusnya sikṣēnya) tkap nikanāṅ dharmma i ptuṅ, wwatakna (seharusnya watēknya) mare japura, ya tan kawnaṅ sini-* (5) *kēp, keṅētakna kawwaṅḅanya, kawatēkanya pājarakna i lbū ni pāduka śrī mahārāja, tan wuruṅ ḍawuhana ḍaṅḅḅa sapathanya ya nikanāṅḅulah ginawayakēnya, i wruha nikāṅ wwaṅ kabeḅ kapwa prayatna, kunaṅ pwa ri ta-* (6) *n kawukilwukilanya hlam dlāha niṅ dlāha, tkap nira saṅaṅḅgata prabhu senāpati, sernāyaka wadwā haji, tka ri cakṣu para cakṣu, mataṅnyan sinaphalakēn pinanaḍahakēn sapatha, i bhaṅara punta hyaṅ, ma*

### **Kelompok II Lempeng 5b**

(1) *ka pamū (...)* *tamā siṅhala bēntuk, bharanya mā 4 taṅḅa haji, pinaka panaḍahnya sapatha i bhaṅara punta hyaṅ raśanikā sapatha, iṅḅaḅ ta kita kamuṅ hyaṅ bhaṅara punta hyaṅ, hyaṅḅgasti, saḅāśa pūrbwa (seharusnya pūrwwa) dakṣiṅa paścimo-* (2) *ttara, madhyordhum (seharusnya madhyordham) adhaḅ, rawi śaśī, kṣiti jala sawana (seharusnya pawana) hutāśana yajamanākāśa, dharmma, ahorātri, sāndhyadwya, yakṣa, rakṣasa, piśāca, pretāśura, garuḍa, gaṅḅarwa graha, kinnara, mahoraga, watwariloka-* (3) *pāla (seharusnya catwārilokapāla), yama, baruṅa, kuwera, bāsawa, mwaṅ putradewata, paṅcakuśika, nandiśwara, mahākāla, śadwināyaka, nagarāja, durgadewī, caturāśra, ananta surendra, ananta hyaṅ kalamṛtyu, gaṅa, bhūta, kitami-* (4) *lu maśarīra umasuki sarba maśarīra, kita sakala sākṣi bhūta, tumonadoḅ lāwanapar, ri rahineṅ wṅi (tan) paṅākēniṅ samaya sapatha sumpaḅ pamaṅmaṅ mami ri kita hyaṅ kabaiḅ yāwat ikāṅ wwaṅ durā-* (5) *cāra anya knayya (seharusnya kna ya) nugraha pāduka śrī mahārāja, irikanāṅ dharmma i ptuṅ sapāsuk dharmma brāhmaṅa kṣatriya weśya sudra, hadyan pulun (seharusnya hulun) matuha rarai, laki laki, wadwan, grḅasta wiku nāyaka, cakṣu* (6) *para cakṣu, para sandhi bisa, asiṅumulahulāḅ anugraha pāduka śrī mahārāja, tka riṅ dlāha niṅ dlāha, tasmā*

(seharusnya *tasmāt*) *tka kṛta knanya patyanan ta ya kamuṅ hyaṅ, de yan tat pati ya, tan panoliha rī wuntat, tat tahalara*

### **Alih Bahasa Prasasti Babahan**

#### **Kelompok I Lempeng 1b**

(1) Pada tahun Śaka 839 bulan *śrawaṇa* hari keempat menuju bulan mati, pada saat hari pasaran *wijayakrānta*, ketika itulah saatnya paduka raja Śrī Ugrasena melakukan perjalanan ke Buwunan, juga itulah saatnya beliau menghadiahkan orang-orang tua (2) di Buwunan, yaitu beliau *bhikṣu* yang bernama Dharmmeśwara, keinginan orang di Songan yang bernama *bhikṣu* Dharmmacchāya, dan pertapaan yang berada di puncak bukit di Ptung, dan ditentukan batas-batasnya oleh Saṅ Ratu Śrī Ugrasena, itulah (3) wilayah pertapaan di Ptung, batas utaranya Air Talbud, batas selatannya Hyang Padmaka, batas baratnya Airana bagian barat, batas timurnya Da Hyang Bangkyang Sidi juga itulah perintahku terhadap (4) pertapaan di Ptung dan memanfaatkan air sucinya, hendaknya orang-orang yang melakukan perjalanan melewati pertapaan di Ptung itu, (membayar biaya kepada?) orang yang bertanggung jawab di sekitarnya, jika ada orang-orang itu, bertempat tinggal di sana, melakukan pemujaan (purnama atau *tilem*) (5) di tempat suci desa lain di wilayah puncak bukit, wihara, *śīma*, *śāla*, silunḷun, kakluṅan, paṅlumbigyan, pēndēm, prataya, dan aluki, jika pada waktunya ada orang mati *tyarah* (bersimbah darah?) (6) orang yang jatuh dari pohon, disambar petir, orang-orang di pertapaan itu diizinkan untuk menyuruh menguburkannya, tidak dikenakan biaya, tidak diberatkan orang-orang itu, tidak dikenakan *pirak paṅṅkṣma* (biaya penyucian)

#### **Kelompok II Lempeng 4a**

(1) dan diberitahukan lebih awal, yang diterimanya oleh beliau Mpu Hulu Skar yang bernama Bisani memberi hormat menghadap ke hadapan Sri Maharaja Sri Wala Prabhu, sebagai perantara para pejabat dalam majelis permusyawaratan paripurna kerajaan, (2) yang

terhormat para senapati, yang terhormat beliau pendeta Śiwa dan Buddha, adapun sebab-sebab Mpu Hulu Skar menghadap Paduka Sri Maharaja, berkeinginan memohon kemurahan hati beliau untuk mengabdikan keinginannya untuk mentembagikan isi (3) prasastinya, yang dihadiahkan oleh raja sebelumnya, tidak kuat dan rusak lontarnya, tidak bisa dibaca, *tēkyēn* dan Paduka Sri Maharaja, bagaikan penjelmaan Dewa Wiṣṇu, pelindung alam semesta yang peduli kepada kesempurnaan dunia (negara) (4) yang dipimpin beliau, yang dihormati Sanghyang Sarwwa Dharma, itulah sebabnya turun anugerah beliau Paduka Sri Maharaja, kepada Mpu Hulu Skar, untuk menuliskan ke dalam tembaga isi prasastinya yang dianugerahkan oleh raja sebelumnya, adapun mereka diizinkan untuk membuat parit (kali/saluran air) (5) mengolah lahan dalam bentuk apapun dan sebagainya, mengolah segala jenis air, tidak dikenakan denda, diperbolehkan menebang pohon kemiri, bodhi, beringin, kembang kuning, *mēṅḍē* (*Garcinia* atau sejenis manggis), kemukus, kapulaga, segala jenis kayu larangan (6) jika menghalangi saluran airnya atau menaungi sawahnya, seperti pohon kelapa tidak dianggap salah, demikianlah jika membayar pajak raja, tidak dikenakan iuran yang berkenaan dengan pembelian, tidak diberlakukan iuran (berupa) perak oleh para pegawai, tidak disalahkan

#### **Kelompok II Lempeng 4b**

(1) tidak dikenakan (iuran) *paṅḷyē*, tidak kena (iuran) *patusuk* dan *pakirab*, (iuran) *paptang* segala jenis pajak raja, petugas pajak, dan orang-orang yang diupah, adapun mereka itu menaati isi prasasti sebelumnya, termasuk (isi dari) lontar yang akan dituliskan ke dalam tembaga, demikianlah isi (2) anugerah Paduka Sri Maharaja, kepada bangunan suci di Ptung sewilayahnya, telah disaksikan di dalam majelis permusyawaratan paripurna kerajaan, para senapati, yang terhormat pendeta Śiwa dan Buddha, (3) beliau yang hadir di sana pada waktu itu, sang *senāpati dīnaṅa* Pu Prakasa,

sang *senāpati wāranasi* Pu Tatwa, sang *senāpati wrsantēn* Pu Mnaṅ, sang *senāpati mañiriniṅ* Pu Yoga Priya, sang *senāpati kuturan* Pu Antuk, (4) *samgat lulwan* Hudan Watu, *samgat mañumbul* Capugal, *samgat pañjiṅ ganti* Cicin, *samgat manuratañājñā i hulu* Wāhya, *samgat manuratañājñā i tñah* Jeṅ, *samgat manuratañājñā i wuntat* Padartha, (5) *samgat cakṣukāraṅakrānta* Siwal, *samgat adhikāraṅapura* Haliwat, *samgat cakṣukāraṅapura* Nañuk, *samgat pituha* Clēbaṅ, yang terhormat pendeta Śiwa dan Buddha, beliau dari kelompok Śiwa, *mpuñkwiṅ kanyā* (6) *ḍaṅācāryya* Yati Prawāra, *mpuñkwiṅ bañutiga ḍaṅācāryya* Suddhawañśa, *mpuñkwiṅ pasabhān ḍaṅācāryya* Prapañcita, *mpuñku makarun ḍaṅācāryya* Rājāgama, *samgat juru wadwā ḍaṅācāryya* Oṣadha, beliau dari

### Kelompok II Lempeng 5a

(1) kelompok Buddha *mpuñkwiṅ kadhikāraṅ ḍaṅūpādhyā* Prawacya, *mpuñkwiṅ nāñja ḍaṅūpādhyā* Sarwwarhasiddha, *mpuñkwiṅ bajraśikara ḍaṅūpādhyā* Wiriñci, *mpuñkwiṅ sūryawasa ḍaṅūpādhyā* Buddha Putra, *samgat mañireñiren* (2) *wandami* Rajasa. Demikianlah ditambahkan peraturannya, perintah raja, diberitahukan kepada semua orang yang berjalan melewati seluruh wilayah dari bangunan suci di Ptung, termasuk yang nista sampai yang utama, semuanya dari mereka dan kelompoknya itu (3) hendaknya tidak diperbolehkan melakukan *baryya baryya sīla molahulah* (tiap-tiap perbuatan atau kegiatan yang tidak baik?), tidak boleh mengambil segala tumbuh-tumbuhan, segala jenis buah-buahan, dengan semena-mena memetikinya, tanpa disertai oleh pemiliknya, segala miliknya diambil (dari) tempat tinggalnya (4) tidak tersusun segala atapnya di *bagañjiṅ* (jenis bangunan suci) dan *pahōman* (balai pertemuan), oleh karena ada keinginan tidak melanggar aturan mengikuti (keinginan) Paduka Sri Maharaja, kemudian aturannya (berlaku juga) di bangunan suci di Ptung, (bagi) kelompoknya itu sampai di (daerah)

Japura, mereka tidak diizinkan (5) melupakan kelompoknya, komunitasnya, sampaikanlah ke hadapan Paduka Sri Maharaja, pastilah dikenakan hukuman dari kutukan yang dilakukan dari perbuatannya, yang diketahui oleh semua orang supaya sangat berhati-hati, adapun hal ini (6) tidak dipermasalahkan ke depannya, termasuk (oleh) raja yang berkuasa saat ini, para senapati, *serñāyaka*, *wadwā haji*, termasuk para pengawas, oleh karena itu diserukanlah kutukan itu kepada *Bhaṭara Punta Hyaṅ*

### Kelompok II Lempeng 5b

(1) *ka pamū (...)* *tamā siñhala bēntuk* banyaknya empat masaka (untuk) pejabat kerajaan sebagai persembahan kepada *Bhaṭara Punta Hyaṅ* yang isi kutukannya, semoga engkau semua *Bhaṭara Punta Hyaṅ*, *Hyañāgasti*, yang menguasai arah timur, selatan, barat, (2) utara, alam tengah, atas, bawah, matahari, bulan, tanah, air, angin, api, *Yajamanākāśa*, *dharmma*, siang-malam, fajar-senja, *Yakṣa*, *Rakṣasa*, *Pisāca*, *Pretāsura*, *Garuḍa*, *Gandarwa*, *Graha*, *Kinnara*, *Mahoraga*, (3) *Catwārilokapāla*, *Yama*, *Baruṅa*, *Kuwera*, *Bāsawa*, dan *Putradewata*, *Pañcakuśika*, *Nandiśwara*, *Mahākāla*, *Ṣadwināyaka*, *Nagarāja*, *Durgadewī*, *Caturāśra*, *Ananta Surendra*, *Ananta Hyaṅ Kālamṛtyu*, *Gaṅa*, *Bhūta*, (4) engkau semua ikut menjelma pada semua yang berwujud, engkau menjadi nyata sebagai saksi dalam wujud *bhuta* (alam semesta) (dari) yang terlihat, dekat dan jauh, di saat malam, (bagi mereka) yang mengingkari janji, perjanjian kutukan dan sumpah ini hamba ajukan kepadamu, wahai semua dewa, demikian juga kepada (5) orang jahat, jika mereka melanggar isi dari anugerah Pāduka Śrī Mahārāja, di bangunan suci di Ptung dan wilayah sekitar bangunan suci itu, baik itu dari kelompok *brāhmaṅa*, *kṣatriya*, *weśya*, *sudra*, majikan, hamba (atau budak), tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, pendeta, pemimpin, (6) para pengawas, para *sandhi bisa*, jika (mereka) yang melakukan perbuatan (tersebut terhadap) anugerah Pāduka

Śrī Mahārāja, sampai di kemudian hari, oleh karena itu hingga telah dilakukan (perbuatan tersebut) hendaknya bunuhlah mereka wahai engkau para dewa, jika mereka tidak mati, tidak ada yang akan melihat (terasingkanlah) mereka akhirnya, tidak mungkin tidak sengsara.

### Jenis dan Unsur Kelengkapan Prasasti

Kelompok I Prasasti Babahan termasuk ke dalam jenis prasasti *sima* yang dianugerahkan kepada masyarakat di Buwunan, Songan, dan daerah pertapaan di Ptung. Prasasti ini merupakan prasasti pendek karena bagian pembukaan dan bagian isi dijadikan satu serta terangkum dalam satu sisi lempeng saja. Unsur-unsur yang terdapat dalam kelompok I Prasasti Babahan adalah sebagai berikut. (1) Unsur penanggalan, berupa waktu dikeluarkannya prasasti oleh raja, yaitu pada tahun 839 Śaka (917 Masehi), bulan *śrawaṇa*, hari keempat menuju bulan mati atau *kṛṣṇapaksa*, dan pada hari pasaran *wijayakrānta*. (2) *Sambandha* atau alasan dikeluarkannya prasasti, yaitu hadiah raja kepada orang-orang tua (*pitāmaha*) di Buwunan, Songan, dan pertapaan di Ptung berupa pemberian status wilayah pertapaan di Ptung dan sekitarnya sebagai daerah perdikan yang diberikan pada saat paduka raja melakukan perjalanan ke sana. (3) Nama raja yang mengeluarkan prasasti, yaitu Saṅ Ratu Śrī Ugrasena. (4) Nama penerima anugerah prasasti, yaitu *bhikṣu* yang bernama Dharmmeśwara dan *bhikṣu* yang bernama Dharmmacchāya. (5) Batas-batas wilayah pertapaan di Ptung, yaitu Air Talbud (utara), Hyang Padmaka (selatan), Airana bagian barat (barat), dan Da Hyang Bangkyang Sidi (timur). (6) Aturan-aturan berupa kewajiban bagi orang-orang yang melakukan kegiatan keagamaan di pertapaan di Ptung, dan aturan mengenai perlakuan terhadap orang yang meninggal. Kelompok I Prasasti Babahan merupakan prasasti yang tidak lengkap karena bagian penutup yang biasanya berisi penyebutan saksi-saksi (pejabat tingkat pusat dan daerah, serta para dewa), dan seruan *śapatha* (kutukan) tidak ada. Oleh

karena itu, terdapat kemungkinan bahwa masih ada lempeng lain yang menjadi kelanjutan dari kelompok prasasti ini.

Kelompok II Prasasti Babahan termasuk ke dalam jenis prasasti *sima* yang dianugerahkan bagi bangunan suci di Ptung sebagai daerah perdikan. Prasasti kelompok II juga bukan prasasti yang lengkap karena bagian pembukaannya tidak ada, dan hanya memiliki bagian isi dan penutup saja. Adapun, unsur-unsur yang terkandung dalam kelompok II Prasasti Babahan adalah sebagai berikut. (1) *Sambandha*, yang di dalamnya menyebutkan juga nama raja yang mengeluarkan prasasti, yaitu Śrī Mahārāja Śrī Wālaprabhu, dan nama penerima anugerah, yaitu Mpu Hulu Skar yang bernama Bisani. Adapun, alasan dikeluarkannya prasasti ini adalah pembuatan prasasti baru yang terbuat dari tembaga untuk menggantikan prasasti lama yang terbuat dari lontar dan telah rusak serta sudah tidak dapat dibaca lagi. (2) Perincian mengenai hak-hak berupa kebebasan untuk melakukan beberapa jenis kegiatan, seperti pembuatan parit, hak pengelolaan lahan dan air, serta pembebasan dari beberapa jenis iuran. (3) Nama-nama pejabat kerajaan yang menjadi saksi pada saat penetapan prasasti. (4) Perincian kewajiban yang harus dipatuhi masyarakat, seperti larangan untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu. (5) *Śapatha* atau kutukan berupa seruan kepada para dewa untuk menghukum setiap orang yang melanggar isi prasasti tersebut.

### Konteks Sejarah Prasasti Babahan

Kelompok I dan II Prasasti Babahan dikeluarkan oleh dua orang raja yang berbeda, yaitu Raja Ugrasena dan Raja Wālaprabhu. Kelompok I prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Ugrasena yang memerintah setidaknya selama 27 tahun, yaitu dari tahun 837 sampai 864 Śaka (915 sampai 942 Masehi). Masa pemerintahan raja ini hampir sezaman dengan masa pemerintahan Pu Sindok di Jawa Timur. Prasasti yang ditemukan hingga saat ini yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena

berjumlah 9 kelompok prasasti. Selain Prasasti Babahan kelompok I, kedelapan prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena adalah Prasasti Srokadan (837 Śaka), Sembiran AI (844 Śaka), Pengotan AI (846 Śaka), Batunya AI (855 Śaka), Dausa Pura Bukit Indrakila AI (857 Śaka), Dausa Pura Bukit Indrakila BI (864 Śaka), Serai AI, dan Gobleg Pura Batur A (Astawa 1995, 52). Dalam pembacaan Goris (1954, 71), angka tahun dikeluarkannya Prasasti Serai AI adalah 888 Śaka. Terdapat anakronisme dalam pembacaan angka tahun tersebut karena jika dikaitkan dengan masa pemerintahan raja-raja Bali kuno, tahun 888 Śaka berada dalam masa pemerintahan Raja Tabanendra Warmadewa dan Śrī Subhadrika Dharmadewī (877 sampai 889 Śaka) (Astra 1997, 402). Anakronisme tersebut kemudian diperbaiki oleh Damais (1960, 155) dengan memperkirakan bahwa Prasasti Serai AI kemungkinan dikeluarkan pada tahun 858 Śaka. Sementara itu, Prasasti Gobleg Pura Batur A tidak menyebutkan angka tahun dan nama raja yang mengeluarkan, tetapi terdapat penyebutan *yumu pakatahu* yang berarti 'hendaknya kamu semua mengetahui'. Gaya penulisan demikian tidak ditemukan di masa setelah pemerintahan Raja Ugrasena sehingga prasasti ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Raja Ugrasena (Goris 1954, 11).

Kelompok II Prasasti Babahan dikeluarkan oleh Raja Wālaprabhu dan tidak menyebutkan angka tahun. Raja Wālaprabhu memerintah sesudah masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Sampai saat ini, prasasti yang diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Raja Wālaprabhu baru ditemukan sebanyak tiga kelompok prasasti yang kesemuanya tidak mencantumkan angka tahun. Selain Prasasti Babahan kelompok II, dua kelompok prasasti lain yang dikeluarkan oleh raja ini adalah Prasasti Ababi dan Prasasti Klandis (Suhadi 1979, 8-10; van der Tuuk dan Brandes 1885, 619-624). Goris (1954, 26) pernah memberikan kemungkinan bahwa nama Wālaprabhu dapat diduga sebagai terjemahan dalam bahasa

Sanskerta dari Anak Wungsu (*wāla* = anak) (cf. Sumadio 1993, 303). Damais (1959, 687-688) menyangkal penafsiran Goris tersebut karena Anak Wungsu tidak pernah menggunakan gelar *śrī mahārāja*. Oleh karena itu, sosok Wālaprabhu dan Anak Wungsu tidak dapat disamakan. Lebih lanjut, Damais memperkirakan bahwa masa pemerintahan Raja Wālaprabhu berlangsung antara tahun 1001 sampai 1010 Śaka (1079 sampai 1088 Masehi). Selain itu, Raja Wālaprabhu juga menjadi raja pertama yang memakai gelar *śrī mahārāja*, sedangkan raja-raja sebelumnya umumnya menggunakan gelar *sang ratu* atau *paduka haji* (Sumadio 1993, 303).

### **Pranata Sosial dalam Prasasti Babahan**

Sebagai suatu peradaban, kerajaan-kerajaan yang berkembang pada masa Bali kuno memiliki ciri-ciri masyarakat kompleks. Konsep masyarakat kompleks tersebut dapat dipahami dengan tiga ciri yang menonjol, yaitu munculnya keragaman (*heterogeneity*), munculnya ketidaksetaraan (*inequality*), dan munculnya pranata-pranata yang bersifat nasional. Pranata yang bersifat nasional ini mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang dijadikan pedoman atau sumber orientasi bagi semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan (Rahardjo 2011, 29-30). Prasasti dapat digunakan untuk mencari gambaran pranata sosial masa Bali kuno karena sifatnya sebagai putusan resmi yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan yang berlaku umum bagi semua anggota masyarakat. Dalam pranata sosial, biasanya yang dikenal sebagai pranata sosial utama (*basic social institutions*) adalah pranata politik, agama, dan ekonomi. Tiap pranata tersebut memiliki bagian-bagian yang menjalankan fungsi khusus, tetapi dalam kenyataannya, fungsi-fungsi tersebut dapat saling terkait dengan pranata lainnya. Bahkan, terdapat juga kemungkinan adanya suatu pranata yang dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus (Rahardjo 2011, 12-13). Namun dalam Prasasti Babahan, pranata

sosial yang dapat terungkap jelas hanya terbatas pada pranata politik dan agama.

### Pranata Politik

Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani *politikos* yang berarti ‘berkaitan dengan polis (negara-kota)’. Menurut Aristoteles (dalam Turner 2006, 445), objek politik adalah keteraturan masyarakat dan tatanan sosial yang terwujud di dalam polis. Pelaku politik (*politician*) berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik agar mencapai tujuan normatif suatu masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para pelaku yang terlibat di dalam politik bertugas dalam membuat dan menerapkan hukum atau peraturan demi tercapainya masyarakat yang teratur. Politik berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sosial masyarakat ke dalam suatu organisasi yang efektif. Unit organisasi politik tertinggi dalam suatu masyarakat sangat bervariasi, mulai dari skala negara-kota (*polis*) yang kecil sampai negara atau kerajaan besar (Turner 2006, 445). Dalam konteks peradaban, khususnya peradaban kuno, Flannery (1972, 400) menyatakan bahwa peradaban (*civilization*) merujuk pada suatu fenomena kebudayaan yang kompleks yang cenderung muncul dalam bentuk organisasi sosial politik berupa negara atau kerajaan (*state*). Oleh karena itu, negara atau kerajaan menjadi unit organisasi politik tertinggi dalam peradaban Bali kuno. Sebagai suatu organisasi politik, kerajaan Bali kuno telah memiliki sistem birokrasi di dalamnya (Astra 1997, 22). Dalam menjalankan pemerintahannya, secara umum, sistem birokrasi pada masa Bali kuno dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu birokrasi tingkat pusat dan tingkat daerah, dengan raja sebagai pemegang pucuk pemerintahan. Menurut Astra (1997, 220-221), birokrasi tingkat pusat pada masa kerajaan Bali kuno memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. (1) Kegiatan birokrasi diselenggarakan di ibukota kerajaan dengan raja sebagai tokoh penguasa sentral. (2) Kegiatan birokrasi melibatkan

pejabat-pejabat tinggi yang kewenangannya berlaku bagi seluruh wilayah kerajaan. Secara lebih konkret, pejabat-pejabat tersebut adalah mereka yang hadir dalam sidang kerajaan dan ikut menyaksikan penganugerahan prasasti. Sebagai suatu birokrasi, pelaksanaannya memerlukan lembaga dan pejabat pelaksanaannya. Hal demikian terdapat juga dalam birokrasi tingkat pusat masa Bali kuno yang tercermin melalui data prasasti.

Prasasti-prasasti yang terbit sejak awal masa Bali kuno sampai dengan akhir masa pemerintahan Ugrasena, atau sejak abad ke-9 sampai sekitar pertengahan abad ke-10 Masehi, tidak memuat nama lembaga pemerintahan tingkat pusat. Indikasi keberadaan lembaga pemerintahan tingkat pusat kerajaan Bali kuno pertama kali ditemukan dalam Prasasti Sembiran B yang tidak menyebutkan nama raja, tetapi berangka tahun 873 Śaka (951 Masehi) yang menyebutkan “*samohanda senapati di panglapuan ... (maka)supratibaddha*” (Astra 2002, 128; Goris 1954, 73; Damais 1990, 84-85). Secara etimologis, *samohanda* terbentuk dari kata *samoha* dan akhiran *-nda*. Astra (2002, 129) berpendapat bahwa *samoha* dapat disamakan dengan *samūha* yang berasal dari bahasa Sanskerta. *Samūha* dapat diartikan sebagai ‘kumpulan’, ‘himpunan’, atau ‘sidang’ (Zoetmulder 1982, s.v. “samūha”, “samoha II”). Kemudian, *panglapuan* berasal dari kata dasar *lapu* yang berarti ‘lapor’ atau ‘menyatakan’ (Granoka et al. 1985, s.v. “lapu”; Goris 1954, 267), sehingga *panglapuan* dapat diartikan sebagai ‘tempat dinyatakannya sesuatu’. Sementara itu, *supratibaddha* berasal dari kata dasar *pratibaddha* yang berarti ‘terikat’, ‘terpasang’, atau ‘bersatu dengan’ (Zoetmulder 1982, s.v. “pratibaddha”). Namun, Goris (1954, 290) menyamakan arti *pratibaddha* dengan *pratibandha* yang berarti ‘rintangan’ atau ‘halangan’ (cf. Granoka et al. 1985, s.v. “pratibaddha”, “pratibandha”). Jika meninjau dari konteks penyebutannya dalam prasasti, penafsiran Zoetmulder lebih tepat dibandingkan dengan penafsiran Goris. Astra (2002, 129)

kemudian mengartikan *makasupratibaddha* menjadi ‘sebagai suatu kesatuan ikatan’, ‘lengkap’, ‘semua’, atau ‘paripurna’ sehingga istilah *samohanda senapati di panglapan ... (maka)supratibaddha* dapat diartikan sebagai ‘sidang beliau (para) senapati di panglapan (tempat dinyatakannya anugerah raja) ... yang lengkap’. Beberapa variasi lain dalam penyebutan istilah tersebut adalah *samohanda senapati ser nāyaka di pasamakṣa palapknan makasupratibaddha*, dan *senapati ser nāyaka ring pasamakṣa palapknan makabehan* (Astra 1997, 223). Adapun, *pasamakṣa* diduga berasal dari kata *sam* dan *akṣa* yang dapat diartikan sebagai ‘kesamaan pandangan’, sedangkan *palapknan* diduga berasal dari kata dasar *alap* yang berarti ‘mengambil’ sehingga *palapknan* dapat bermakna ‘mengambil suatu keputusan’. Sementara itu, *makabehan* berarti ‘semua’ (Astra 2002, 129-130; Zoetmulder 1982, s.v. “akṣa”, “alap”, “kabeh”). Meskipun istilah-istilah yang mengindikasikan adanya suatu lembaga pemerintahan tingkat pusat tersebut belum muncul hingga akhir masa pemerintahan Raja Ugrasena, terdapat petunjuk bahwa pucuk pemerintahan atau raja telah dibantu oleh sejumlah pejabat tinggi yang biasanya disebutkan di awal prasasti, antara lain *sarbwa*, *dīngāna*, *nāyakan makarun*, dan *mañūratang ājñā* (Goris 1954, 53-72; Astra 2002, 128).

Dalam perkembangannya, indikasi keberadaan lembaga pemerintahan tingkat pusat kerajaan Bali kuno terlihat lebih jelas dan baku pada awal abad ke-11 Masehi ketika mulai digunakannya istilah *pakirakirān i jro makabehan* yang muncul dalam Prasasti Batur Pura Abang A yang dikeluarkan oleh Raja Udayana pada tahun 933 Śaka (1011 Masehi) (Astra 2002, 131; Goris 1954, 88-94). Kata *pakirakirān* berasal dari kata *kirakira* yang berarti ‘ide’, ‘upaya’, atau ‘akal’ (Zoetmulder 1982, s.v. “kira”). Dalam konteks ini, kata tersebut dapat bermakna ‘menemukan upaya atau cara untuk memecahkan masalah’ (Astra 2002, 130). Adapun, kata *i jro* diartikan sebagai ‘di dalam’ (Zoetmulder 1982, s.v. “jro”), sehingga dapat

diartikan sebagai ‘lingkungan dalam istana atau kerajaan’. Oleh karena itu, istilah *pakirakirān i jro makabehan* dapat dimaknai sebagai majelis permusyawaratan paripurna kerajaan (Astra 1997, 222). Penyebutan *pakirakirān i jro makabehan* biasanya diikuti oleh nama-nama jabatan yang ada di dalam lembaga tersebut. Beberapa jabatan yang sering muncul atau paling umum ditemukan dalam *pakirakirān i jro makabehan*, antara lain adalah kelompok *senapati*, kelompok *samgat*, serta kelompok pendeta (*mpungku*) Śiwa dan Buddha (Astra 2009, 124; Ardika et al. 2013, 141).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prasasti-prasasti yang dikeluarkan hingga masa pemerintahan Raja Ugrasena tidak memuat nama lembaga pemerintahan tingkat pusat. Kondisi demikian terlihat juga di Prasasti Babahan kelompok I. Selain penyebutan raja sebagai pucuk pemerintahan, Prasasti Babahan kelompok I bahkan tidak menyebutkan jabatan lain yang secara kontekstual dapat dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan. Hal berbeda tampak dari Prasasti Babahan kelompok II yang dikeluarkan oleh Raja Wālaprabhu. Gambaran mengenai birokrasi pemerintahan terlihat lebih jelas dalam prasasti ini dengan adanya penyebutan *pakirakirān i jro makabehan* di lempeng 4a (1-2) dan 4b (2) yang terdiri dari kelompok *senapati*, *samgat*, serta pendeta Śiwa dan Buddha (*mpuñku sēwasogata*). Lempeng 4b dan 5a bahkan memberikan rincian lebih detail mengenai ketiga kelompok jabatan tersebut. Prasasti Babahan kelompok II menyebutkan kelompok jabatan *senapati* yang terdiri dari *senapati dīnaṇa*, *senapati wāranasi*, *senapati wrsantēn*, *senapati mañirinin*, dan *senapati kuturan*. Secara harfiah, *senapati* berarti panglima perang atau pemimpin tentara (Zoetmulder 1982, s.v. “senapati”). Menurut Goris (dalam Sumadio 1993, 316), jabatan *senapati* dapat dibandingkan dengan jabatan punggawa pada masa kerajaan Gelgel dan Klungkung yang memiliki lembaga peradilan sendiri, dan memiliki kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu (cf. Astra 1997, 251).

Setelah penyebutan kelompok jabatan *senapati*, lempeng 4b dan 5a kemudian menyebutkan kelompok jabatan *samgat* yang terdiri dari *samgat lulwan*, *samgat mañumbul*, *samgat pañjiñ ganti*, *samgat manuratañājñā i hulu*, *samgat manuratañājñā i tñah*, *samgat manuratañājñā i wuntat*, *samgat cakṣu kāraṇakrānta*, *samgat adhikāraṇapura*, *samgat cakṣu kāraṇapura*, dan *samgat pituha*. Menurut de Casparis (1956, 220), kata *samgat* merupakan bentuk singkat dari *sang pamgat*. Kata *pamgat* terbentuk dari kata dasar *pgat* yang berarti ‘putus’ yang ditambah dengan awalan *pa-*, sehingga secara harfiah, *sang pamgat* atau *samgat* berarti ‘sang pemutus’ (Zoetmulder 1982, s.v. “pēgat”). Arti ‘sang pemutus’ menunjukkan bahwa pejabat yang menduduki jabatan *samgat* adalah tokoh yang mahir atau ahli dalam bidang tertentu (Astra 1997, 269). Sepuluh jenis jabatan *samgat* yang muncul dalam Prasasti Babahan kelompok II tersebut memiliki fungsi di bidang-bidang nonkeagamaan. Selain itu, terdapat juga jabatan *samgat* lain yang diduga lebih berperan di dalam bidang-bidang keagamaan, yaitu *samgat juru wadwa* dan *samgat mangireniren wandami* (Astra 1997, 269-270; 2002, 132-133). Kedua jenis jabatan *samgat* tersebut biasanya dipegang oleh para pemuka agama sehingga pembahasan lebih rinci akan dimasukkan dalam pranata religi.

Selain kelompok *senapati* dan *samgat*, terdapat juga penyebutan kelompok *mpuñku sewasogata* atau kelompok pendeta Śiwa dan Buddha yang termasuk dalam *pakirakirān i jro makabehan*. Pada masa kerajaan Bali kuno, kelompok pemuka agama memiliki peran penting dalam pemerintahan, dan tidak semata-mata hanya mengurus bidang keagamaan saja. Keterlibatan para pemuka agama ini dalam menjalankan pemerintahan dapat dipahami karena sebagai sastrawan, para pendeta bukan saja ahli dalam sastra-sastra keagamaan, tetapi juga dalam sastra-sastra bidang ketatanegaraan, politik pemerintahan, astronomi, dan sebagainya. Beberapa prasasti

Bali kuno ada yang menyebutkan nama-nama karya sastra yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan. Dalam prasasti-prasasti Raja Jayasakti dan Rājajāya, nama-nama kitab yang muncul adalah (1) Uttara Widhi Balawan, (2) Rājawācana, dan (3) Āgama. Sementara itu, beberapa prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus menyebutkan nama-nama kitab (1) Manawāsasanadharmā atau Manawakamandaka atau Manawakamandakadharmasāsana, (2) Daśasila, (3) Pañcaśikṣa, dan (4) Smṛtti. Meskipun para pemuka agama tersebut memiliki pengetahuan di dalam ilmu-ilmu pemerintahan, fungsi mereka lebih cenderung ke fungsi legislatif, bukan eksekutif (Astra 1997, 181; 2002, 134). Pembahasan peran kelompok *mpuñku sewasogata* yang lebih rinci akan dilakukan di bagian pranata religi. Perincian kelompok pendeta Śiwa dan Buddha yang tergabung dalam kelompok *mpuñku sewasogata* ini terdapat di lempeng 4b dan 5a pada Prasasti Babahan kelompok II.

Pada masa kerajaan Bali kuno, pengaruh India tidak hanya meresap dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, seperti organisasi masyarakat, teknologi, kesenian, kesusastraan, dan pendidikan (Astra 1997, 85). Salah satu pengaruh India yang muncul dalam organisasi masyarakat adalah penerapan tatanan sosial (*social order*) yang menggolongkan masyarakat ke dalam empat kelas dan dikenal dengan istilah *catur warna*. Sebelum masa pemerintahan Raja Anak Wungsu (971 sampai 999 Śaka), sumber-sumber prasasti tidak menyebutkan secara jelas pembagian masyarakat yang terdiri atas empat kelas tersebut, meskipun masyarakatnya telah terbagi menjadi beberapa kelompok (Sumadio 1993, 327).

Penyebutan *catur warna* ini muncul dalam Prasasti Babahan kelompok II lempeng 5b (5) yang menyebutkan adanya kelompok masyarakat *brāhmaṇa*, *ksatriya*, *weśya*, dan *sudra*. *Warna brāhmaṇa* merupakan golongan masyarakat yang terdiri dari para pemuka

agama atau rohaniwan. Pada masa Bali Kuno, kelompok yang termasuk ke dalamnya adalah kelompok *śewasogata* atau *sogata mahaśwara*. *Warṇa kṣatriya* adalah golongan masyarakat yang terdiri dari para pemimpin atau pejabat pemerintahan dan pemimpin militer. Pada masa Bali Kuno, golongan ini umumnya terdiri dari para *senāpati* dan *samgat*, termasuk para pejabat tingkat daerah. *Warṇa weśya* adalah golongan masyarakat yang terdiri dari kaum pedagang, tukang, petani kaya, dan kelompok lain yang bergerak di bidang niaga serta memiliki kelebihan dari segi material. *Warṇa sudra* adalah golongan masyarakat yang bertugas sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh ketiga *warṇa* sebelumnya (Wiguna 2009, 51).

Berdasarkan keterangan dari sejumlah prasasti, hubungan antargolongan tersebut dibatasi dalam hal-hal tertentu melalui berbagai peraturan. Sebagai contoh, wanita dari golongan Brahmana yang menjadi golongan tertinggi dalam *catur warṇa* tidak boleh diperistri oleh golongan lain. Larangan tersebut salah satunya terdapat dalam cuplikan Prasasti Sukawana B (1103 Śaka) lempeng 3b (6) yang menyebutkan “*yan hana rwangnyā sakarāman salah margga hyun makāstri babini brāhmawangśa santana huñjēman juru kling manahura ya pamucuk*”, yang berarti ‘jika ada anggota *se-karāman* salah jalan hendak memperistri wanita keturunan brahmana, juru kling mereka membayar (denda) *pamucuk*’ (Suarbhawa et al. 2013, 10, 24).

Selain dari keempat *warṇa* tersebut, Prasasti Babahan kelompok II juga menyebutkan golongan *hulun* yang berarti hamba atau budak (Zoetmulder 1982, s.v. “*hulun*”). Astra (1997, 105) menduga bahwa golongan *hulun* merupakan kelompok di luar *catur warṇa* karena terdapat petunjuk dalam Prasasti Dawan (975 Śaka) yang mengindikasikan bahwa mereka dapat ditukar atau dinilai dengan sejumlah uang sehingga seperti semacam budak belian. Meskipun sebagai budak, golongan *hulun* ini tidak dapat diperlakukan semena-mena. Hal tersebut

tercermin dari beberapa prasasti Bali kuno yang menyebutkan tentang aturan-aturan terkait hutang-piutang. Dalam aturan-aturan tersebut, terdapat uraian mengenai perlindungan hukum bagi budak-budak yang berhutang, seperti yang tercantum dalam Prasasti Kintamani D, Kintamani E, Dausa Pura Bukit Indrakila AII (938 Śaka), Campetan (1071 Śaka), Sukawati A, dan Banjar Pucangan Pengotan (999 Śaka). Prasasti Kintamani D dan Kintamani E menyebutkan bahwa apabila terdapat budak yang terlilit hutang dan mengungsi ke Desa Kintamani, masyarakat desa wajib memberikan perlindungan dan harus memperlakukan budak tersebut secara manusiawi, tidak boleh disiksa, dan dibunuh. Sementara itu, Prasasti Dausa Pura Bukit Indrakila AII dan Campetan menyebutkan adanya larangan untuk melipatgandakan pokok hutang. Selain itu, hutang budak tersebut tidak berlaku surut, dan bebas dari biaya administrasi. Prasasti Sukawati A dan Banjar Pucangan Pengotan menyebutkan bahwa orang yang dijadikan budak karena tidak mampu membayar hutang, harus dibebaskan sebagai budak apabila orang tersebut atau keluarganya melunasi pokok hutangnya (Suarbhawa 2001, 73-74)

### **Pranata Agama**

Pranata agama yang dibahas pada penelitian ini dikhususkan pada pranata agama Hindu dan Buddha yang berkembang pada masa kerajaan Bali kuno. Salah satu bukti tertulis paling awal mengenai perkembangan agama Buddha adalah prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta pada tablet-tablet tanah liat yang semula tersimpan di dalam stupika-stupika di Pejeng. Prasasti itu berupa mantra-mantra agama Buddha atau dikenal dengan istilah *ye-te-mantra*. Berdasarkan perbandingan tipe aksaranya, mantra tersebut diperkirakan berasal dari periode yang sama dengan mantra sejenis yang ada di atas pintu Candi Kalasan yang berasal dari abad ke-8 Masehi. Sementara itu, bukti tertulis paling awal terhadap perkembangan agama Hindu berasal

dari fragmen-fragmen prasasti yang ditemukan di Desa Pejeng yang berbahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Bali kuno. Bagian-bagian yang masih terbaca menyebutkan antara lain, *manuśasana*, *mantramārgga*, *śiwāsiddhanta*, dan *sakalabhūwanakṛt*. Penyebutan tersebut memberikan petunjuk bahwa isi prasasti itu bersifat keagamaan, yaitu Hindu Śiwa. Fragmen tersebut tidak mencantumkan angka tahun, tetapi melalui perbandingan tipe aksaranya dengan tipe aksara pada prasasti-prasasti di Jawa, aksara pada fragmen prasasti di Desa Pejeng itu di antaranya ada yang diperkirakan berasal dari permulaan abad ke-9 Masehi (Astra 1997, 51-52). Adapun, bukti tertua yang mencantumkan angka tahun berasal dari Prasasti Sukawana A I yang berangka tahun 804 Śaka (882 Masehi) yang di dalamnya terdapat penyebutan pemuka agama *bhikṣu* Śiwakangśi, Śiwanirmmala, dan Śiwaprajñā (Goris 1954, 53).

Penyebutan pemuka agama *bhikṣu* ini muncul pada lempeng 1b (2) Prasasti Babahan kelompok I yang digunakan untuk menyebutkan golongan pendeta (Sumadio 1993, 320). Selain itu, *sambandha* atau alasan dikeluarkannya prasasti yang menetapkan daerah pertapaan di Ptung dan sekitarnya sebagai daerah perdikan menunjukkan bahwa raja memiliki perhatian tinggi terhadap kehidupan beragama. Kemudian pada lempeng 1b (5), terdapat penyebutan nama-nama, seperti wihara, śīma, śāla, siluṅluṅ, kakluṅ, paṅlumbigyan, pēndēm, prataya, dan aluki yang diperkirakan merujuk pada bangunan atau tempat suci keagamaan (Ardika et al. 2013, 227-228). Gambaran lebih lengkap terhadap pranata religi terlihat dalam Prasasti Babahan kelompok II yang menyebutkan adanya kelompok *mpuṅku śewasogata* yang termasuk ke dalam *pakirakirān i jro makabehan* pada lempeng 4b (2-6) dan 5a (1-2). Kelompok ini merupakan wakil dari pemuka agama Śiwa dan Buddha, dan mulai muncul dalam Prasasti Serai AII (915 Śaka atau 993 Masehi) yang dikeluarkan oleh Gunapriyadharmapatni dan Udayana (Parwati 1990, 40-41; Goris 1954, 80-83). Dalam prasasti, golongan pendeta agama

Śiwa biasanya memakai gelar *dangācāryya*, sedangkan golongan pendeta agama Buddha memakai gelar *dangupādhyāya* (Sumadio 1993, 321). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kelompok *mpuṅku śewasogata* termasuk ke dalam *pakirakirān i jro makabehan* sehingga mereka termasuk ke dalam bagian dari lembaga pemerintahan tingkat pusat. Dalam Prasasti Babahan kelompok II, kelompok pendeta agama Śiwa (*kaśaiwan*) terdiri dari *mpuṅkwiṅ kanyā*, *mpuṅkwiṅ baṅutiga*, *mpuṅkwiṅ pasabhān*, *mpuṅku makarun*, dan *samgat juru wadwā*, sedangkan dari kelompok pendeta agama Buddha (*kasogatan*) terdiri dari *mpuṅkwiṅ kadhikāran*, *mpuṅkwiṅ nālñja*, *mpuṅkwiṅ bajrasīkara*, *mpuṅkwiṅ sūryawasa*, dan *samgat maṅireṅireṅ wandami*. Kata *mpuṅkwiṅ* merupakan bentuk singkat dari frasa *mpuṅku iṅ* yang berarti ‘mpuṅku di’, sehingga kata yang mengikuti kata *mpuṅkwiṅ* menunjukkan nama lokasi, seperti Kanyā, Baṅutiga, Pasabhān, Kadhikāran, Nālñja, Bajrasīkara, dan Sūryawasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan sehari-hari, pendeta yang bersangkutan berkedudukan dan memberikan pelayanan keagamaan di daerah tertentu. Namun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari *pakirakirān i jro makabehan*, mereka berfungsi sebagai pejabat tingkat pusat (Astra 2002, 131-132). Istilah *mpuṅku* merupakan sebuah sebutan kehormatan yang secara harfiah berarti ‘yang melindungiku’ atau ‘yang menjagaku’. Penggunaan istilah tersebut bagi para pendeta Śiwa dan Buddha menunjukkan bahwa kedudukan pemuka agama pada masa Bali Kuno sangat dihormati (Astra 2002, 134). Selain *mpuṅku*, terdapat juga penyebutan *samgat juru wadwā* dari kelompok pendeta agama Śiwa dan *samgat maṅireṅireṅ wandami* dari kelompok pendeta agama Buddha. Penyebutan ini menunjukkan bahwa jabatan *samgat* tidak hanya berfungsi di bidang-bidang nonkeagamaan, tetapi juga terdapat jabatan *samgat* yang berfungsi di bidang keagamaan. Kata *wadwā* memiliki arti ‘pengikut dalam jumlah yang banyak’

(Zoetmulder 1982, s.v. “wadwā”). Oleh karena itu, *samgat juru wadwā* dapat diduga sebagai jabatan yang tugasnya berkaitan dengan urusan pengikut atau umat agama Śiwa. Dalam bahasa Sanskerta, *wāndami* berarti ‘saya berbicara’ sehingga peran *samgat mañireñiren wandami* kemungkinan diperkirakan memiliki kaitan dengan peran juru bicara (Sumadio 1993, 323-324).

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam Prasasti Babahan kelompok II adalah kutipan pada lempeng 4a (3-4) yang berbunyi “*pāduka śrī mahārāja, wiṣṇumurti sāksāt jagat pālaka kumiñki sakaparipūrñnakna nikāñ rāt rinakṣanīra*” yang berarti ‘Paduka Sri Maharaja, bagaikan penjelmaan Dewa Wiṣṇu, pelindung alam semesta yang peduli kepada kesempurnaan dunia (negara) yang dipimpin beliau’. Kutipan tersebut menggambarkan konsep tentang gagasan kepemimpinan seorang raja yang berkembang pada masa klasik Hindu-Buddha. Menurut Heine-Geldern (1942, 22) kerajaan-kerajaan kuno yang berkembang di Asia Tenggara sangat terkait dengan konsep kekuasaan raja yang bersumber dari kekuatan adikodrati atau ilahi (*divine kingship*). Keilahian seorang raja dapat dipahami melalui beberapa cara, tergantung dari religi yang berkembang. Dalam konsep agama Hindu, seorang raja dapat dipahami sebagai penjelmaan dan/atau keturunan dari dewa sehingga dapat menjadi sumber legitimasi kekuasaan yang kuat bagi seorang raja atau penguasa. Kutipan dalam Prasasti Babahan tersebut menunjukkan bahwa Raja Wālaprabhu seperti penjelmaan Dewa Wiṣṇu di dunia yang berfungsi sebagai pemelihara atau pelindung dunia beserta seluruh isinya. Kendati demikian, penyebutan *Wiṣṇumurti* tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa Raja Wālaprabhu merupakan penganut sekte Waiṣṇawa. Menurut Astra (1997, 125), ungkapan tersebut hanya bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa raja yang bersangkutan mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Dewa Wiṣṇu sehingga dirinya berkewajiban melindungi serta memakmurkan

negara dan rakyatnya. Penganalogian seorang raja sebagai penjelmaan Dewa Wiṣṇu tampak juga pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu, Śūrādhipa, dan Jayasakti yang menyebutkan dirinya bagaikan *Harimūrti* dan *Wiṣṇumurti* (Ardika et al. 2013, 221; Astra 1997, 97-98). Penganalogian serupa terjadi juga pada kerajaan-kerajaan di Jawa kuno yang penggunaannya setidaknya sudah sejak akhir periode Mataram kuno, seperti yang terdapat pada Prasasti Kuti (762 Śaka atau 840 Masehi) yang tercermin dari penyebutan nama Śrī Mahārāja Śrī Lokapala Hariwangṣotungga dewanāmarājābhīṣeka. Nama Wiṣṇu kemudian digunakan lagi pada masa Airlangga (*saksat ... Wiṣṇumurti*), dan sangat umum digunakan pada masa Kadiri hingga Singhasari (Rahardjo 2011, 79; Damais 1990, 92-137).

Legitimasi seorang raja yang bersandar pada kekuatan adikodrati ditunjukkan juga melalui penyebutan *śapatha*. Secara harfiah, *śapatha* berarti ‘kutukan’ atau ‘sumpah’ (Zoetmulder 1982, s.v. “śapatha”). Sebagai salah satu unsur dalam prasasti, *śapatha* berisi seruan kepada para dewa, roh nenek moyang, dan segala kekuatan alam untuk menjadi saksi atas isi prasasti dan/atau juga untuk memberikan perlindungan terhadap ketetapan isi prasasti agar mereka memberikan hukuman kepada orang yang berani melanggar ketetapan isi prasasti (Maulana 1993, 127). Melalui *śapatha*, kebijakan raja yang dilindungi oleh kekuatan adikodrati tersebut memiliki legitimasi yang kuat karena pemberian hukuman bagi siapapun yang melanggarnya bukanlah dari raja, tetapi dari kekuatan adikodrati itu sendiri.

Penyebutan *śapatha* ini terdapat di Prasasti Babahan kelompok II lempeng 5a dan 5b. Adapun, penyebutan kekuatan adikodrati yang melindungi ketetapan dalam prasasti tersebut antara lain adalah sebagai berikut. (1) Nama-nama dewa, seperti Bhaṭara Puncta Hyañ, Hyañāgasti (dalam prasasti Jawa kuno disebut Agastimahārṣi atau Agastyā), dewa-dewa *catwārilokapāla* atau *caturlokapāla* (yaitu Yama, Baruṇa, Kuwera, dan Bāsawa),

dewa-dewa *pañcakusika* (Prasasti Babahan tidak menyebutkan dewa-dewa yang termasuk di dalamnya, yaitu Kusika, Gargga, Metri, Kurusya, dan Pātañjala), Śadwināyaka (penyebutan lain Ganeśa), Nagarāja (berdasarkan kitab Vāmana-Purāṇa, tokoh ini dapat dihubungkan dengan Bhairawa Nāgarāja), Durgā (*śakti* Dewa Śiwa dalam wujud *ugra*), Surendra (penyebutan lain Dewa Indra), dan Kālamṛtyu (dewa kematian). (2) Makhluk halus atau makhluk setengah dewa, yaitu Yakṣa, Rakṣasa, Piśāca, Pretāsura, Garuḍa, Gaṇḍarwa, Graha, Kinnara, dan Mahoraga. (3) Raksasa atau makhluk setengah dewa yang terkait Dewa Śiwa, yaitu Nandiśwara dan Mahākāla (dua raksasa penjaga gerbang tempat tinggal Śiwa), serta Gaṇa (kelompok pengiring Dewa Śiwa). Dalam *śapatha*, kekuatan adikodrati itu disebutkan sebagai penguasa arah-arah mata angin, gejala-gejala alam, dan segala unsur yang ada di alam semesta. Unsur-unsur yang disebutkan tersebut di antaranya adalah unsur dari *pañcamahābhūta*, yaitu tanah (*kṣiti*), api (*hutāsana*), air (*jala*), angin (*pawana*), dan ruang (*ākāśa*). *Pañcamahābhūta* merupakan 5 materi dasar alam semesta yang juga dianggap sebagai 5 dari 8 materi dasar (*asta mūrti*) Śiwa, yaitu jika ditambahkan dengan matahari (*rawi*), bulan (*śaśi*), dan *yajamāna* (penyelenggara upacara agama yang mewakili manusia) (Sedyawati 1994, 144-148; Maulana 1993, 133-144; Yogaswara 2005, 33-38; Zoetmulder 1982, s.v. “gaṇa”, “kālamṛtyu”, “surendra”).

## KESIMPULAN

Prasasti Babahan terdiri dari dua kelompok. Kelompok I terdiri dari lempeng 1b yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena pada tahun 839 Śaka (917 Masehi), sedangkan kelompok II terdiri dari lempeng 4a, 4b, 5a, dan 5b yang dikeluarkan oleh Raja Wālaprabhu dan tidak mencantumkan angka tahun. Prasasti Babahan kelompok I menggunakan aksara dan bahasa Bali kuno, sedangkan kelompok II menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Kedua kelompok Prasasti Babahan tersebut merupakan prasasti

yang tidak lengkap, dan berjenis prasasti *sima* yang terkait dengan penetapan wilayah di Ptung sebagai daerah perdikan. Pranata sosial yang tampak dari Prasasti Babahan kelompok I dan II adalah pranata politik dan agama. Gambaran pranata politik pada Prasasti Babahan kelompok I hanya berupa penyebutan raja sebagai pucuk pemerintahan. Pranata politik pada Prasasti Babahan kelompok II terlihat melalui penyebutan istilah *pakirakirān i jro makabehan*, yang terdiri dari kelompok *senapati*, *samgat*, serta pendeta Śiwa dan Buddha. Prasasti Babahan kelompok II juga memperlihatkan adanya tatanan sosial berupa penggolongan masyarakat ke dalam empat kelas yang dikenal dengan istilah *catur warna*, yaitu *brāhmaṇa*, *kṣatriya*, *weśya*, dan *sudra*. Selain keempat *warna* tersebut, terdapat juga golongan *hulun* yang merupakan kelompok di luar *catur warna*. Pranata agama dalam Prasasti Babahan kelompok I ditunjukkan melalui penyebutan pemuka agama *bhikṣu* dan bangunan atau tempat suci keagamaan. Selain pertapaan di Ptung, penyebutan bangunan atau tempat suci keagamaan yang lain adalah wihara, *śīma*, *śāla*, silunluṅ, kakluṅ, pañlumbigyan, pēndēm, prataya, dan aluki. Pranata agama pada Prasasti Babahan kelompok II diperlihatkan melalui penyebutan kelompok pendeta Śiwa dan Buddha (*mpuṅku śewasogata*). Kelompok pendeta Śiwa menggunakan gelar *dangācāryya*, sedangkan kelompok pendeta agama Buddha menggunakan gelar *dangupādhyāya*. Selain itu, terdapat juga penyebutan *samgat juru wadwā* dari kelompok pendeta Śiwa dan *samgat mañireñiren wandami* dari kelompok pendeta Buddha. Pranata agama juga ditunjukkan melalui gagasan kepemimpinan yang dimiliki oleh Raja Wālaprabhu yang menyebutkan dirinya bagaikan penjelmaan Dewa Wiṣṇu. Prasasti Babahan kelompok II juga terdapat penyebutan *śapatha*. Penyebutan *śapatha* dan penganalogian diri raja bagaikan penjelmaan sosok dewa mencerminkan bentuk legitimasi kekuasaan yang kuat bagi seorang raja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan, I Gde Parimartha, dan A. A. Bagus Wirawan. 2013. *Sejarah Bali: dari Prasejarah hingga Modern*. Denpasar: Udayana University Press.
- Astawa, Anak Agung Oka. 1995. "Mata Pencaharian Penduduk pada Zaman Raja Sang Ratu Śri Ugrasena." Dalam *Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi: Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, disunting oleh Endang Sri Hardiati, Naniek Harkantiningsih, Harry T. Simanjuntak, Sonny Wibisono, Lien D. Ratnawati, dan Marsudi, 51-58. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Astra, I Gde Semadi. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis." Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 2002. "Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat pada Masa Gunapriyadharmapatni - Dharmodayana Warmadewa." *Humaniora* XIV (2): 127-136.
- \_\_\_\_\_. 2009. "Epigrafi, Historiografi, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Multikultural." Dalam *Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Bidang Sastra dan Budaya*, 111-135. Denpasar: Udayana University Press.
- Bakker, J.W.M. 1972. *Ilmu Prasasti Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Budaya IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.
- Boechari. (1977) 2012. "Epigrafi dan Sejarah Indonesia." Dicitak ulang, dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti: Kumpulan Tulisan Boechari*, disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 3-28. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- de Casparis, J.G. 1956. *Selected Inscriptions from The 7<sup>th</sup> to The 9<sup>th</sup> Century A.D.* Volume II dari *Prasasti Indonesia*. Bandung: Masa Baru.
- Damais, Louis-Charles. 1959. "Notices Bibliographiques: Ouvrages d'Études Indonésiennes." *Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient* 49 (2): 679-702.
- \_\_\_\_\_. 1960. "Études Balinaises V: Date de Quelques Nouvelles Chartes Balinaises." *Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient* 50 (1): 153-160.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Études d'Épigraphie Indonésienne*. Paris: École Française d'Extrême Orient.
- Djafar, Hasan. 1991. "Prasasti dan Historiografi." Dalam *Seminar Sejarah Nasional IV: Subtema Historiografi*, 177-216. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Dwiyanto, Djoko. 1995. "Pendekatan Ilmu Sosial dalam Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik." Dalam *Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi: Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, disunting oleh Endang Sri Hardiati, Naniek Harkantiningsih, Harry T. Simanjuntak, Sonny Wibisono, Lien D. Ratnawati, dan Marsudi, 238-247. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Flannery, Kent V. 1972. "The Cultural Evolution of Civilizations." *Annual Review of Ecology and Systematics* 3:399-426.
- Goris, Roelof. 1954. *Prasasti Bali*. 2 Vols. Bandung: N.V. Masa Baru.
- Granoka, Ida Wayan Oka, I Gde Semadi Astra, I Gusti Ngurah Bagus, I Wayan Jendra, I Nengah Medera, dan Ketut Ginarsa. 1985. *Kamus Bali Kuno – Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Heine-Geldern, Robert. 1942. "Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia." *The Far Eastern Quarterly* 2 (1): 15-30.
- Kartakusuma, Richadiana. 2003. "Peran dan Fungsi Epigrafis sebagai Bidang Studi Sumber Tertulis dan Permasalahannya." Dalam *Cakrawala Arkeologi: Persembahan untuk Prof. Dr. Mundardjito*, disunting oleh R. Cecep Eka Permana, Wanny Rahardjo W., dan Chaksana A.H. Said, 199-217. Depok: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Maulana, Ratnaesih. 1993. *Siva dalam Berbagai Wujud: Suatu Analisis Ikonografi di Jawa Masa Hindu-Buddha*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Nastiti, Titi Surti. 2009. "Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuno (Abad VIII-XV Masehi)." Disertasi, Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

- Parwati, Anak Agung Ayu Raka. 1990. "Jabatan-Jabatan Pemerintahan di Tingkat Daerah pada Zaman Bali Kuno dalam Periode Abad IX-XI." Skripsi, Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Peradaban Jawa: dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 2000. *Archaeology: Theories, Methods, and Practice*. London: Thames & Hudson Ltd.
- Sedyawati, Edi. 1994. *Pengarcaan Gaṇeṣa Masa Kaḍiri dan Siṅhasāri: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Rijksuniversiteit te Leiden.
- Soesanti, Ninie. 1997. "Analisis Prasasti." Dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII*. Jilid 1, disunting oleh Endang Sri Hardiati, 171-182. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2001. "Sisi Kemanusiaan pada Kasus Utang-Piutang dalam Prasasti Bali dan Jawa Kuna Abad X-XIII." *Forum Arkeologi*, no. 1: 67-78.
- Suarbhawa, I Gusti Made, I Nyoman Sunarya, I Wayan Sumerata, dan Luh Suwita Utami. 2013. "Prasasti Sukawana." *Berita Penelitian Arkeologi* (Balai Arkeologi Denpasar).
- Suhadi, Machi. 1979. *Himpunan Prasasti Bali Koleksi R. Goris dan Ktut Ginarsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- Sumadio, Bambang. 1993. *Jaman Kuna*. Jilid II dari *Sejarah Nasional Indonesia*. Disunting oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Balai Pustaka.
- Turner, Bryan S, ed. 2006. *The Cambridge Dictionary of Sociology*. New York: Cambridge University Press.
- van der Tuuk, H.N. dan J.L.A. Brandes. 1885. "Transcriptie van vier Oud-Javaansche Oorkonden op Koper, Gevonden op het Eiland Bali." *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* XXX:603-624.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara. 2009. *Hak-Hak Atas Tanah pada Masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara, Nyoman Sunarya, Wayan Tapa, G.A. Ranuara, I.B. Eka Darma L., Made Mahesa Y.P., dan Wayan Turun. 2004. *Himpunan Prasasti-Prasasti Bali: Masa Pemerintahan Jayapangus*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Yogaswara, Wawan. 2005. "Sapatha dalam Prasasti Sima dari Masa Majapahit: Sebuah Tinjauan tentang Fungsi." Tesis, Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Zoetmulder, P.J. 1982. *Old Javanese-English Dictionary*. 2 Vols. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.